

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik, seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip *GCG* antara lain *fairness*, *transparancy*, *accountability* dan *responsibility*. Menurut Beasley (1996) dalam Savitri (2010) menyatakan bahwa keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *GCG* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Beberapa peraturan terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* baik yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sudah mensyaratkan keberadaan komisaris independen dan komite audit bagi semua perusahaan publik. Ditambah lagi, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 117/2002 sudah mensyaratkan hal yang sama untuk BUMN.

Dalam penelitian ini lebih menekankan pada prinsip *transparency* dan *accountability*. Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Sedangkan *accountability*, artinya perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organisasi perusahaan sehingga *corporate governance* terlaksana secara efektif diwujudkan melalui pelaporan keuangan yang tepat waktu. Pengungkapan perusahaan dan transparansi merupakan karakteristik dari pelaporan keuangan, yang didefinisikan sebagai perluasan laporan keuangan yang mengungkapkan entitas perusahaan dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Barth dan Schipper(2008) dalam Virginia dan Eleni(2008). Maka perusahaan dikelola benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan akan mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Sistem *corporate governance* memerlukan pengawasan pemegang saham dan tanggung jawab manajemen Shkolnikov(2001) dalam Virginia dan Eleni, (2008). Mekanisme pengawasan manajemen baik internal (berdasarkan organisasi) maupun eksternal berdasarkan pasar diwajibkan Walsh dan Seward(1990). Dewan direksi atau komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif merupakan mekanisme pengawasan internal untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan pemilik. Disisi lain kepemilikan

pihak luar, *monitoring debtholder*, peraturan pemerintah (perlindungan kepemilikan investor) merupakan mekanisme pengawasan eksternal yang membantu internal untuk pengawasan efektif perusahaan.

Elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme *corporate governance* adalah keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, persentase saham yang dimiliki oleh institusional (kepemilikan institusional), persentase saham yang dimiliki oleh manajemen (kepemilikan manajerial), keberadaan komite audit dalam perusahaan serta kualitas audit. Mekanisme *corporate governance* diwajibkan untuk meyakinkan kualitas, integritas, *transparancy* dan *reliability* informasi akuntansi yang disediakan oleh manajer, seperti sistem pengendalian internal, komisaris independen, komite audit dan auditor eksternal.

Bushman, Chen, Engel, & Smith (2000) dalam Virginia & Eleni (2008) menyatakan bahwa komposisi dewan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional apabila berhubungan dengan kinerja yang buruk maka akan mempengaruhi aktivitas perusahaan serta kurang efektif dalam peraturan perusahaan. komposisi dewan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional apabila berhubungan dengan kinerja yang buruk maka akan mempengaruhi aktivitas perusahaan serta kurang efektif dalam peraturan perusahaan. Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajemen. Chtourou(2001) dalam Savitri(2010).

Komisaris Independen suatu perusahaan harus benar-benar independen dan dapat menolak pengaruh, intervensi dan tekanan dari pemegang saham utama yang memiliki kepentingan atas transaksi atau kepentingan tertentu. Weisbach(1988) dalam Arifin(2005).

Tarjo (2002) menyatakan semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain dirinya sendiri. Struktur kepemilikan lebih banyak berada di tangan manajer, maka manajer akan lebih leluasa dalam mengatur melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, serta kebijakan-kebijakan akuntansi perusahaan.

Beberapa penelitian telah melaporkan hasil penelitian tentang hubungan komite audit dan kualitas pelaporan keuangan. Beberapa penelitian cenderung untuk mendukung keberadaan komite audit karena meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Klien(2001) DeFond dan Jiambalvo(1991) McMullen(1996) Beasley dan Salterio(2001) McMullen dan Raghunandan(1996) dalam Jama'an (2008). Dalam penelitian ini kualitas pelaporan keuangan yang dimaksud yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Dyer dan Hugh (1975) dalam Jama'an (2008) yang menyatakan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan. Ketepatan waktu (*timeliness*) pelaporan keuangan akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien di pasar saham yaitu sebagai fungsi evaluasi dan *pricing*, mengurangi tingkat *insider trading* dan kebocoran serta rumor-rumor di pasar saham. Owusu dan Ansah dalam Rachmawati (2008)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di muka, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
2. Apakah komite audit perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
5. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai :

1. Pengaruh komisaris independen terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
2. Pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Pengaruh *Leverage* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
4. Pengaruh Profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
5. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1 Untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh antara mekanisme *corporate governance* (komisaris independen, komite audit) dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 2 Bagi lembaga-lembaga yang terkait pasar modal. Penelitian ini diharapkan mendorong pihak perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya melalui ketepatan waktu pelaporan keuangan.
- 3 Bagi peneliti lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lain yang sejenis.

1.5 kontribusi penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Hilmi dan Ali (2008) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk periode waktu 2004-2006 adalah profitabilitas, likuiditas, kepemilikan publik, dan reputasi KAP. Sedangkan variabel leverage keuangan, ukuran perusahaan dan opini auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Penelitian yang akan datang selanjutnya dengan menambahkan variabel mekanisme *Corporate Governance* serta mengganti objek pada penelitian sebelumnya yang semula semua perusahaan yang *go publik* dengan di fokuskan pada perusahaan perbankan yang listing di bursa efek indonesia selama periode 2012 – 2014.